

MEREKA TIDAK BISU: MAKNA & PEREBUTAN SIMBOL MONUMEN, PATUNG, DAN TUGU DI KOTA SURABAYA¹

Sarkawi B. Husain²

Pendahuluan

“Anasionalis, Patung Raffles Harus Dirobohkan”, “Lupakan Predikat Kota Pahlawan: Patung Penjajah Bertebaran di Surabaya”³.

Kalimat di atas adalah *headline* dua tabloid yang terbit di Surabaya berkaitan dengan dijadikannya patung Raffles sebagai *landmark* kawasan Citra Raya. Bagi masyarakat Surabaya, keberadaan perumahan mewah yang terletak di Surabaya Barat dan berslogan *Citra Raya, The Singapore of Surabaya* tersebut sesungguhnya tidak menimbulkan masalah. Akan tetapi, ketika pengembangnya menjadikan patung Raffles sebagai *landmark*-nya, maka protes dari berbagai kalangan pun tidak terhindarkan. Berikut beberapa protes masyarakat yang disampaikan lewat media cetak.

“Mungkin Raffles adalah pahlawan di Singapura, namun di Indonesia Raffles adalah seorang kapitalis yang menjajah bangsa kita. Kalau mengaku mempunyai jiwa kebangsaan mengapa tidak memilih ikon-ikon nasional saja untuk dibuat patungnya di Citra Raya”⁴

“Citra Raya dan Yakobus sudah harus dikatakan sebagai anasionalis dengan pemasangan Raffles di Kota Pahlawan. Saya mendukung bila ada gerakan untuk merobohkan patung penjajah di Citra Raya”⁵.

Bagi sebagian masyarakat Surabaya, kehadiran patung Raffles sebagai salah seorang mantan gubernur jenderal Hindia Belanda seolah membuka kembali “luka” lama akibat penjajahan, sehingga ingatan terhadapnya tidak boleh dihadirkan kembali. Sementara itu, pihak Citra Raya yang diwakili oleh direktur utamanya (Sutoto Yakobus)

¹Makalah dipresentasikan pada Konferensi Nasional Sejarah VIII, 14-17 November 2006 di Hotel Millenium, Jakarta. Makalah ini merupakan bagian dari penelitian “Negara di Tengah Kota: Politik Simbolisme Kota Surabaya 1930-1960”. Terima kasih kepada Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) dan Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PMB-LIPI) yang telah membiayai penelitian ini.

²Staf pengajar pada jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Airlangga Surabaya.

³‘Anasionalis, patung Raffles harus dirobohkan’ Dalam *Novum* 2004, hal. 20; ‘Lupakan predikat kota pahlawan, patung penjajah bertebaran di Surabaya’ Dalam *Sapujagat*, no. 59, tahun V, 1-15 Juli 2004, hal. 9.

⁴Anasionalis..., *loc. cit.*

⁵*Ibid.*

justro tidak menganggap Raffles sebagai penjajah, sebaliknya menganggap sebagai ilmuwan yang banyak memberi kontribusi di bidang ilmu botani, yang namanya dipakai sebagai nama latin bunga bangkai yang ditemukannya⁶.

Kontroversi atas pendirian sebuah patung, monumen atau tugu sesungguhnya tidak hanya terjadi dengan kasus patung Raffles. Pendirian monumen Husni pada masa kolonial misalnya, juga menuai protes. Demikian pula dengan pendirian tugu pahlawan pada tahun 1952 dan rencana pendirian monumen W. R. Soepratman pada tahun 1950-an. Oleh karena itu, merujuk pada kasus di atas, keberadaan sebuah patung, monumen atau tugu menarik untuk menjadi titik tolak analisis, karena mereka merupakan objek yang semata-mata dibangun untuk kepentingan simbolik⁷.

Dari monumen⁸ Bali hingga patung dada Wilhelmina: Monumen dan patung pada masa kolonial

Pada masa kolonial, terdapat tiga istilah yang sering digunakan, yaitu *monument* (monumen) misalnya Bali-monument, *borstbeeld* (patung orang dari dada ke atas) misalnya borstbeeld van H.M. Koningin Wilhelmina, dan *buste* (patung dari dada ke atas) misalnya buste van Sir Thomas Stamford Raffles. Selama rentang waktu kekuasaannya di Kota Surabaya, pemerintah kolonial Belanda mendirikan ± 14 monumen dan patung yang tersebar di berbagai kawasan. Sayang sekali, tidak satupun dari tugu dan monumen tersebut dapat kita saksikan hari ini. Berikut ini saya akan deskripsikan secara singkat beberapa monumen tersebut.

Pada tanggal 4 September 1869, dilakukan pembukaan *Monumen-Bali* yang terletak di bekas tangsi Djotangan (sekarang di depan Polwiltabes, Jalan Sikatan). Monumen ini didirikan untuk memperingati kemenangan Belanda dalam perang di Bali. Dalam perang yang berlangsung pada April 1849 ini, pasukan Belanda dipimpin oleh

⁶Lupakan..., *loc. cit.*

⁷Freek Colombijn, 'Sign of the times: Symbolic change around Indonesian independence.' Makalah International Workshop Urban Symbolism, Leiden, 16- 18 Juni 2004.

⁸Dalam kamus besar bahasa Indonesia, istilah monumen, patung, dan tugu memiliki pengertian yang berbeda. *Monumen* adalah bangunan atau tempat yang mempunyai nilai sejarah yang penting dan karena itu harus dipelihara dan dilindungi oleh negara. *Patung* adalah tiruan bentuk orang, hewan, dan sebagainya yang dibuat dari batu, kayu, dan sebagainya, sedangkan *tugu* adalah tiang besar dan tinggi yang dibuat dari batu, bata, dan lain-lain. Untuk kepentingan analisis, tulisan ini akan mengacu pada perbedaan pengertian tersebut. Hasan, Alwi, dkk. (ed.), *Kamus besar bahasa Indonesia*. Edisi ketiga. (Jakarta: Balai Pustaka, 2001).

Jenderal Michiels. Monumen terbuat dari besi tuangan yang berlantai marmer dan bentuknya sangat mirip dengan monumen Michiels yang didirikan di Padang, sebagai peringatan atas kemenangan Belanda dalam perang di Sumatera Barat yang juga dipimpin oleh jenderal Michiels bersama Raaff⁹.

Kedua monumen tersebut merupakan ekspresi dominasi Belanda atas daerah-daerah di nusantara. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, seluruh daerah di nusantara (Maluku, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Aceh, Jawa Tengah dan Timur, dan lain-lain) telah berhasil ditaklukkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Pertanyaannya kemudian adalah mengapa monumen Bali sebagai simbol kemenangan Belanda atas raja-raja Bali itu tidak didirikan di Bali, tetapi justru di Surabaya. Ada dua dugaan yang dapat diajukan untuk menjawab pertanyaan ini. *Pertama*, tujuan pemerintah kolonial Belanda memang tidak hendak menguasai Bali, tetapi hanya untuk menciptakan dasar hukum untuk menutup Bali dari kekuatan-kekuatan Barat lainnya. Untuk itu, monumen sebagai simbol kekuasaan mereka tidak perlu dihadirkan. *Kedua*, rasa kemerdekaan orang-orang Bali sangat kuat sehingga kehadiran monumen sebagai simbol kemenangan pemerintah kolonial akan sangat menyinggung perasaannya dan akan menimbulkan perlawanan¹⁰.

Monumen yang juga menarik dan pernah berdiri di kota ini adalah sebuah monumen yang diperuntukkan bagi G. von Bultzingslöwen. Pada salah satu sisi dari monumen yang terletak di persimpangan Pasar Besar – Gemblongan Baliwerti, terdapat gambar atau relief yang menggambarkan G. von Bultzingslöwen sedang menolong dan merawat seorang serdadu Belanda yang tewas dalam Perang Aceh. Atas pengabdian ini, G. von Bultzingslöwen mendapat penghargaan dari palang merah (*Ridder van het Roode Kruis*). Pada saat kembali di Surabaya tahun 1874, G. von Bultzingslöwen yang juga banyak menulis puisi dalam bahasa Belanda, Perancis, dan Jerman ini disambut dengan meriah¹¹. Ini adalah satu dari dua monumen yang bertahan hingga tahun 1960-an.

⁹Freek Colombijn, *Patches of Padang: The History of an Indonesia Town in the Twentieth Century and the Use of Urban Space* (Leiden: Research School CNWS, 1994), hal. 345-346.

¹⁰M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994), hal. 203.

¹¹G. H. von Faber, *Oud Soerabaia, De Geschiedenis van Indië's Eerste Koopstad van de Oudste Tijden tot de Instelling van den Gemeenteraad* (Soerabaia: Gemeente Soerabaia, 1931), hal. 124.

Pembangunan sebuah monumen pada zaman kolonial bukanlah tanpa protes. Hal ini misalnya terjadi pada *Monumen Husni* yang didirikan di Darmo Plein. Pendirian monumen untuk mengenang Achmad Dechawad Husni (lahir tanggal 5 September 1897, wafat tanggal 6 Juni 1911) yang tewas karena kecelakaan pesawat udara di atas Ancol, Batavia, pada permulaan upaya penerbangan pertama antara Kota Batavia – Soerabaia.

Bagi beberapa orang Belanda sendiri, pendirian monumen ini tidaklah pantas, apalagi ditempatkan di sebuah kawasan yang indah, yakni Darmo yang merupakan kawasan elit. Kontroversi atas monumen ini tidak lantas membuatnya dihancurkan atau diganti dengan monumen lain. Sebaliknya, tetap bertahan setidaknya sampai akhir tahun 1960an. Selain monumen untuk tokoh-tokoh politik, pada masa kolonial juga didirikan monumen untuk memperingati jasa seseorang dalam bidang-bidang tertentu, seperti *Monumen Rambaldo*. Monumen ini terletak di Taman Kroesepark (sekarang taman Aspari depan Gedung Grahadi, Jalan Gubernur Suryo). Rambaldo adalah seorang yang paling penting dan perintis perjalanan lewat udara. Antara tahun 1908-1911 diorganisir sebuah perjalanan udara dengan menggunakan balon. Pada tahun 1910 didirikan perkumpulan N.V. Vereniging untuk perjalanan udara. Pendirian monumen ini adalah bentuk penghargaan dan ungkapan rasa terima kasih dari N.V. ini pada Rambaldo¹².

Nasib monumen ini sama dengan yang lainnya. Di lokasi tempatnya berdiri tidak ada jejak yang dapat meyakinkan kita pernah berdiri sebuah monumen. Dugaan saya monumen ini dihancurkan dan digantikan dengan patung Gubernur Suryo¹³ yang saat ini berdiri di Taman Aspari (Depan Gedung Grahadi). Selain monumen-monumen di atas, masih terdapat beberapa monumen untuk mengenang jasa orang-orang Belanda yang dianggap berjasa bagi negaranya. Misalnya monumen untuk mengenang E.B. van den Bosch sebagai penggagas *cultuurstelsel*, Monumen untuk Martinus van den Elzen (seorang pastor Gereja Katolik Roma yang dimakamkan di Peneleh), Monumen Mej.

¹²G. H. von Faber, *Nieuw Soerabaia, de geschiedenis van Indies voornamste koopstad in the eerste kwarteeuw sedert hare instelling 1906-1931* (Soerabaia: Gemeente Soerabaia, 1933), hal. 22.

¹³R.T. Suryo adalah gubernur Jawa Timur Periode 1945-1948. Sebelum menjadi gubernur, Suryo adalah Residen (*Syu Chokan*) Bojonegoro Sudarno, dkk., *Sejarah Pemerintahan Militer dan Peran Pamong Praja di Jawa Timur Selama Perjuangan Fisik 1945-1950* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hal. 69-71.

R. J. Almerood (Direksi pertama Meisjesschool), monumen untuk mayor P.P.C.Q. Ondaatje, dan lain-lain.

Disamping mendirikan monumen, pada masa kolonial juga terdapat beberapa patung. Salah satu patung yang penting pada masa itu adalah *Patung Setengah Badan Ratu H.M. (Hare Majesteit) Koningin Wilhelmina*. Patung ini merupakan sumbangan dari Tuan J.A. Strop kepada *Stadstuin Soerabaia* (Taman Kota yang terletak di depan Kantor Pos Besar) untuk memperingati penobatan H. M. Wilhelmina sebagai ratu pada September 1898¹⁴.

Tidak ada keterangan yang saya temukan kemana patung yang cukup indah ini sekarang berada. Akan tetapi, sangat mungkin patung ini dibongkar pada zaman Jepang mengingat di lokasi yang sama terdapat gedung Kempetai yang sebelumnya merupakan gedung Raad van Justitie. Saat ini di lokasi tersebut sudah berdiri gedung Bank Indonesia, sebuah simbol yang dalam klasifikasi Colombijn termasuk dalam domain modern. Selain patung dada Ratu Wilhelmina, terdapat juga patung dada dari G. F. A. Galati dan patung Sir Thomas Stamford Raffles. Dengan berakhirnya kekuasaan Belanda, maka satu persatu monumen dan patung ini juga menghilang, baik yang dirobohkan begitu saja maupun yang diganti dengan simbol baru yang lebih berbau Indonesia.

Revisi, destruksi, dan bangun yang baru: Monumen, tugu, dan patung di era Jepang dan Republik

Untuk menghilangkan pengaruh dan jejak penguasa sebelumnya, pemerintah pendudukan Jepang melakukan banyak penghancuran terhadap monumen, patung, atau tugu yang didirikan oleh Belanda. Namun demikian, tidak satupun tugu atau monumen yang didirikannya. Kehadirannya yang sangat singkat hanya membawa perubahan pada beberapa aspek sosial, politik, dan pemerintahan. Upaya untuk mendirikan monumen, patung, atau tugu sebagai tanda bagi kehadirannya di kota ini tidak sempat dilakukan. Akan tetapi, sebagai penanda banyaknya orang Jepang dan hubungan dagang dengan mereka, dalam momen-momen tertentu (seperti peringatan ulang tahun ratu Belanda) didirikan sebuah “gapura Jepang” yang diletakkan di

¹⁴G. H. von Faber, *Nieuw Soerabaia...*, *loc. cit.*

depan jembatan menuju kantor walikota. Pendirian ‘gapura Jepang’ inilah saya kira menyebabkan mereka yang hidup pada zaman tersebut hingga kini menyebut jembatan tersebut sebagai jembatan Jepang.

Menurut data yang ada, hanya terdapat dua “monumen kolonial” yang bertahan setelah kemerdekaan hingga tahun 1960-an, yakni Monumen Husni yang terletak di Darmo-Plein (Taman Mayangkara) dan Monumen G. Bultzingslöwen yang terletak di Alun-alun Tjontong. Kedua monumen ini menarik tidak hanya karena dapat bertahan hingga tahun 1960-an, tetapi juga bangunan simbolik yang kemudian menjadi penggantinya memiliki persoalan tersendiri.

Pada akhir tahun 1960-an, monumen ini dirobohkan dan diganti dengan simbol religi berupa pembangunan rumah ibadah. Pembongkaran ini dilakukan karena di lokasi berdirinya (Taman Mayangkara) akan dibangun Masjid Al-Falah. Izin penggunaan lokasinya dikeluarkan oleh Walikotamadya Surabaya, Soekotjo dengan surat No. 7804/88 tanggal 9 Mei 1969¹⁵.

Selain itu, pembangunan Masjid Al-Falah menarik untuk dilihat lebih jauh dengan dua pertimbangan, *pertama*, ide awal lokasi pendirian mesjid ini adalah di depan kantor walikota, tepatnya di persil yang sekarang tempat berdirinya Gereja Maranatha (Jalan Yos Sudarso dahulu Jalan Sindhunegara), akan tetapi tidak mendapat persetujuan¹⁶. *Kedua*, tokoh-tokoh penting yang berperan dalam proses pendiriannya adalah berlatar belakang militer, misalnya Kol. KKO Mohammad Anwar, Letjen H. Sudirman, Letjen Moh. Yasin (saat itu Pangdam VIII/Brawijaya). Apakah ini merupakan cermin dominasi militer dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat mengingat baru saja terjadi peristiwa G 30 S yang menyebabkan berkuasanya militer dalam panggung politik Indonesia?.

Berbeda dengan monumen Husni yang dirobohkan pada akhir tahun 1960-an, proses penghancuran terhadap monumen G. Bultzingslöwen tidak diketahui dengan jelas. Akan tetapi, pada saat Moerachman, S.H. menjadi walikota Surabaya (1964-1965), monumen ini akan dirubuhkan dan diganti dengan tugu petani. Alasan rencana

¹⁵*Kenangan Masjid Al-Falah* (Surabaya: Yayasan Masjid Al-Falah, 1997), hal. 12.

¹⁶Zein M Wiryoprawiro, *Perkembangan Arsitektur Masjid di Jawa Timur* (Surabaya: Bina Ilmu, 1986), hal. 289. Masjid Al-Falah adalah satu dari dua mesjid penting yang dibangun setelah kemerdekaan.

pembongkaran yang dikemukakan dalam sambutan resepsi peringatan Hari Wanita Internasional ini adalah penghargaan terhadap para petani. Lebih jauh Walikota Moerachman mengatakan:

“...kita yang berada di kota ini sekali2 tidak boleh melupakan jasa2 para petani kita. Barang2 jg kita makan sehari2 adalah hasil dari pak tani. Oleh karenanja setiap waktu kitapun harus mengingatkan akan hasil jerih pajahnja. Untuk itu maka baiklah kalau tugu kolonial jang terletak di alun2 Tjontong jang hingga kini masih tegak berdiri diganti dengan tugu petani.

Bentuk dari petani tersebut akan diwujudkan sebagai pak Sakerah dengan tjelana pandjang dan sarung dibebankan. Uduj tersebut kecuali juga kita mengingatkan diri tjerita2 Pak Sakerah jang berjuang melawan Belanda, djuga uduj dari pakaian itu jang sering kita jumpai pada petani2 di Madura”¹⁷.

Dari sejumlah wawancara dan penelusuran sumber tidak ada keterangan yang menyebutkan bahwa ide Moerachman mengganti tugu ini menjadi tugu Pak Sakerah sempat terwujud. Menurut hemat saya, hal ini paling tidak disebabkan oleh dua hal. *Pertama*, setahun setelah Moerachman menyampaikan gagasannya meletus peristiwa G 30 S. Peristiwa ini menyebabkan terhentinya berbagai program pembangunan, termasuk pendirian bangunan simbolik. *Kedua*, berkaitan dengan pemberhentiannya sebagai walikota Surabaya¹⁸. Oleh karena itu, kalau kita jalan-jalan ke alun-alun Tjontong yang kita temukan saat ini adalah patung perjuangan, bukan patung Pak Sakerah.

Walaupun ide ini tidak sempat terwujud, tetap menarik diajukan pertanyaan mengapa walikota (Moerachman) hendak mengganti tugu kolonial ini dengan tugu pak tani (pak Sakerah), bukan tugu atau patung perjuangan? Dengan menelusuri latar belakang historis, politis, dan ideologis Moerachman, maka ide tersebut dapat dipahami. Keterangan yang ada menyebutkan walaupun beliau bukan PKI, tetapi memiliki hubungan yang dekat dengan partai yang pada Pemilu 1955 ini memperoleh suara terbanyak di Kota Surabaya.¹⁹

¹⁷‘Tugu pak Sakerah’ Dalam *Surabaya Post* 11 Maret 1964.

¹⁸ AKS, box 1227, no. 25813.

¹⁹Dari jumlah pemilih sebesar 367.799 orang Untuk pemilihan umum DPR 1955 di Kota Surabaya, masing-masing partai politik memperoleh suara sebagai berikut: PNI 46.282; GPP 1.518; Masjumi 17.727; NU 61.544; **PKI 129.449**; Parkindo 7.766; PSII 3.080; dan Barisan Kesadaran Rakyat 26. Alfian, *Hasil pemilu tahun 1955 untuk D.P.R.* (Jakarta: Leknas, 1971), hal. 90-91.

Dari latar belakang tersebut, dapat ditarik hipotesis bahwa tujuan penggantian tugu kolonial menjadi tugu pak tani (Pak Sakerah) sesungguhnya merupakan gambaran perjuangan dari PKI yang membela kaum buruh dan tani. Dalam banyak literatur disebutkan bahwa petani selalu diharapkan menjadi sumber kekuatan politik oleh PKI.²⁰

Beberapa tahun setelah diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia, kota-kota di Indonesia (termasuk Surabaya) seolah berlomba untuk mendirikan monumen, tugu, dan patung sebagai tanda penghargaan atas jasa para pahlawan yang telah gugur dalam banyak pertempuran. Dengan demikian, di beberapa lokasi pertempuran melawan pemerintah kolonial dapat disaksikan monumen, tugu, dan patung, yang berdiri megah.

Monumen W.R. Soepratman: Impian yang tidak pernah terwujud. Rencana pembangunan monumen W. R. Soepratman dapat dikatakan merupakan rencana proyek prestisius kedua setelah pembangunan tugu pahlawan. Berbeda dengan pemindahan dan pembangunan makam baru bagi W.R. Soepratman yang dengan mudah diwujudkan, pembangunan monumen yang digagas sejak awal tahun 1950-an mengalami berbagai masalah bahkan tidak terlihat wujudnya hingga sekarang. Dari berbagai sumber yang ada, tampaknya rencana pembangunan monumen ini tersangkut persoalan keuangan.

Rencana pembangunan monumen W. R. Soepratman ini mendapat perhatian serius dari Presiden Soekarno. Dalam amanatnya, presiden menyarankan supaya: "...berilah tempat pada tugu Soepratman ini yang bewaga (luas-lapang). Berilah tinggi 5 x 17 m. sama dengan 85 meter"²¹. Saran yang disampaikan oleh Bung Karno tersebut disesuaikan dengan angka-angka "keramat", 5 untuk Pancasila dan 17 untuk tanggal proklamasi. Sebagai seorang presiden yang kata-katanya bagai mantra, apa yang disampaikan atau disarankannya pasti diamini oleh banyak kalangan. Berkaitan dengan saran Soekarno untuk monumen W. R. Soepratman misalnya, seorang wartawan Surabaya Post menimpali:

²⁰Untuk analisis kedekatan PKI dengan petani, baca Arbi Sanit, *Badai Revolusi: Sketsa Kekuatan Politik PKI di Jawa Tengah dan Jawa Timur* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).

²¹'Tugu' Dalam *Surabaya Post*, 15 Oktober 1962.

“Kalau direncanakan tugu veteran berupa bambu runcing itupun akan tinggi menjulang, maka memanglah tepat kalau sekali kita bikin tugu-tugu, haruslah yang besar-besar sekali, melambangkan kebesaran jiwa kita.”²²

Saran atau tepatnya instruksi Presiden Soekarno atas bentuk dan ukuran monumen ini merupakan instruksi kedua setelah pada tahun 1952 menentukan bentuk dan tinggi dari tugu pahlawan. Selain pandangannya bahwa jiwa bangsa tercermin dari bangunan-bangunannya, turut campur tangannya Soekarno dalam penentuan bentuk dan ukuran terhadap beberapa monumen di Kota Surabaya, berkaitan dengan ikatan emosional beliau dengan kota ini. Soekarno menghabiskan sebagian waktu mudanya di kota Surabaya untuk bersekolah di Hogere Burger School (HBS) dan tinggal di rumah H.O.S. Tjokroaminoto di Jalan Peneleh.

Untuk melaksanakan amanat presiden, maka melalui suratnya tertanggal 30 Maret 1963, panitia mengajukan pendapat dan permohonan kepada gubernur agar tanah yang terletak di Wonotjolo yang cukup luas dan memenuhi syarat untuk dapat ditentukan sebagai tempat monumen W. R. Soepratman dan tempat Pusat Kebudayaan serta dicantumkan dengan resmi di dalam rencana perluasan Kota Surabaya. Berkaitan dengan lokasi tersebut, pada tanggal yang sama, panitia telah mengajukan usul kepada Djawatan Planologi di Jakarta dan diperoleh sebidang tanah di Wonocolo dengan luas 240 hektar. Lokasi ini diberikan atas persetujuan Presiden Soekarno²³.

Selain menyetujui tanah yang terletak di Wonocolo sebagai lokasi pembangunan monumen, Presiden Soekarno menyarankan juga agar makam W. R. Soepratman dipindahkan ke tempat ini. Di areal monumen tersebut akan dibangun juga pusat kebudayaan bangsa Indonesia. Tempat-tempat tersebut adalah: Akademi Musik Timur dan Barat, Akademi Seni Tari Timur, Gedung Phylharmony Orkes, Gedung Seni Drama Timur, Gedung Seni Theater, Gedung Rapat Besar, Perpustakaan Kebudayaan, Art Gallery, Museum Kebudayaan, Theater Terbuka (Bowl), Stadsbosch dan Vyver, Taman Bunga, dan Lapangan terbuka di muka monumen dan Vyver²⁴.

²²*Ibid.*

²³Oerip Kasansengari, *Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan W. R. Soepratman Pentjiptanja* (Surabaya: Grafika Karya, 1967), hal. 122.

²⁴*Ibid.*, hal., 125.

Namun demikian, rencana yang ambisius itu tidak pernah terwujud. Panitia yang diberi amanat untuk mewujudkan monumen tersebut tidak berhasil mewujudkannya walaupun sudah dibentuk silih berganti. Mengingat panitia yang dibentuk pada tanggal 5 Januari 1962 dengan ketua Kolonel T.N.I Mochamad Wijono tidak menunjukkan hasil apa-apa, maka pada tanggal 9 Oktober 1963 menteri P.D. dan K kembali melantik pengurus baru yang diketuai oleh Dr. Satrio Sastrodiredjo yang saat itu menjabat sebagai wakil gubernur Jawa Timur dan Moeljono Soerjopramono (Kepala Inspeksi Kebudayaan Daerah Propinsi Jawa Timur) sebagai sekretaris²⁵.

Tidak ada keterangan yang penulis temukan bagaimana panitia ini bekerja dan apa yang telah dihasilkannya. Sebaliknya, yang terjadi justru diberhentikannya Dr. Satrio Sastrodiredjo, Soetojo, dan Roeslan Kamaloedin, masing-masing sebagai ketua, pembantu seksi keuangan, dan sebagai penasehat panitia. Pemberhentian Dr. Satrio Sastrodiredjo, Soetojo, dan Roeslan Kamaloedin dari pemerintahan sekaligus dari kepanitiaan pembangunan monumen sangat berkaitan dengan 'gonjang-ganjing' politik yang terjadi saat itu. Siapa sesungguhnya Dr. Satrio Sastrodiredjo sehingga namanya harus dicoret dari aktivitas sosial dan pemerintahan? Tidak banyak keterangan tentang sosok ini. Dalam beberapa sumber disebutkan, Dr. Satrio Sastrodiredjo merupakan calon tunggal yang diajukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk menjabat sebagai kepala daerah kotapradja Surabaya²⁶. Dr. Satrio Sastrodiredjo yang kemudian menjadi walikota Surabaya periode 1958-1964 ini merupakan anggota PKI sejak tahun 1953 dan menjadi dosen dalam ilmu Neorologi dan Psikiatri pada Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya. Selain itu, dia juga menjabat sebagai wakil ketua Lembaga Persahabatan Indonesia-RRT dan pada masa revolusi menjabat sebagai Menteri Muda Kesehatan²⁷. Pemecatan Dr. Satrio Sastrodiredjo dan dua orang lainnya dari kepanitiaan pembangunan monumen W. R. Soepratman akibat tersangkut dengan organisasi terlarang, sekali lagi menjadi bukti betapa perubahan peta politik dapat 'menjungkirbalikkan' karir politik seseorang.

²⁵ *Ibid.*, hal. 145.

²⁶ Sesudah debat tentang tata-tertib dan prosedur pemilihan, akhirnya Dr. Satryo terpilih secara aklamasi menjadi Kepala Daerah Kotapradja Surabaya periode 1958-1964. Pemilihan kepala daerah ini merupakan pertama kalinya di Kota Surabaya. 'Sesudah debat tentang prosedur. Dengan aklamasi Dr. Satryo dipilih djadi Kepala Daerah Kota Surabaya' Dalam *Surabaya Post*, 12 Djuni 1958; 'Besok malam pilihan kepala daerah Kotapradja Surabaya' Dalam *Djawa Pos*, 10 Djuni 1958.

²⁷ PKI tjalonkan Dr. Satrio sebagai Kepala Kotapradja Surabaya' Dalam *Djawa Pos*, 3 Djuni 1958.

Dari L.M.S. (Lucas Martin Sarkies) Oranye Hotel, Yamato Hosteru, hingga Hotel Majapahit: Monumen yang terus hidup. Sampai pertengahan September 1945, hotel yang bernama Mandarin Oriental Hotel Majapahit ini tidak ubahnya dengan hotel-hotel lain, yakni sebagai tempat menginap para tamu yang berkunjung ke Surabaya. Hanya saja, dibandingkan dengan hotel lain, Oranye Hotel menjadi tempat tinggal banyak orang-orang Belanda. Tanggal 19 September 1945, segalanya berubah. Pada tanggal itu, hotel yang cukup mewah ini tidak lagi sekedar berfungsi sebagai tempat menginap para tamu, tetapi menjadi ajang terjadinya bentrokan antara arek-arek Surabaya dan orang-orang Belanda yang terkenal dengan “Insiden Bendera”.

Menurut Frederick, walaupun pengutaraan kembali cerita tersebut di kemudian hari telah dibumbui, insiden bendera memiliki tempat yang terhormat di dalam cerita revolusi Surabaya dan sesungguhnya juga di seluruh negeri²⁸. Tidak pelak lagi, peristiwa ini telah menjadikan Hotel Majapahit sebagai salah satu monumen yang sangat penting di Kota Surabaya²⁹. Selain itu, peristiwa insiden bendera dan tempat berlangsungnya (Oranye Hotel atau Hotel Majapahit) menjadi peristiwa dan monumen yang memiliki tingkat rujukan nasional. Di buku-buku pelajaran sejarah yang dipergunakan di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia kita dapat membaca peristiwa ini dan melihat gambar pemuda–pemuda yang sedang menurunkan bendera Belanda.

Jembatan Merah : Mencari jejak sang pahlawan. Seperti halnya hotel Majapahit, Jembatan Merah adalah contoh sesuatu yang sebelumnya sudah ada dan dengan sebab-sebab tertentu menjadi simbol kota. Pada zaman kolonial, jembatan ini berfungsi untuk menghubungkan daerah sebelah barat Kalimas yang dahulu menjadi daerah pemukiman orang Eropa (*Europeesche Wijk*) dengan daerah sebelah timur Kalimas yang dahulu menjadi daerah pemukiman orang Cina (*Pecinan*), orang Arab (*Arabische Kamp*), dan daerah Melayu. Tepat di depan jembatan tersebut sampai tahun 1925 terdapat gedung (kantor) residen yang merupakan pusat pemerintahan Kota

²⁸Keterangan lebih jauh tentang insiden bendera ini dapat dibaca dalam William H. Frederick, *Pandangan dan Gejolak: Masyarakat Kota dan Lahirnya Revolusi Indonesia (Surabaya 1926-1946)*. (Jakarta: Gramedia, 1986), hal. 254-262.

²⁹Pentingnya makna hotel ini tercermin dari dimasukkannya sebagai salah satu dari 163 benda cagar budaya yang dilindungi. Berdasarkan SK Walikota Surabaya Kepala daerah Tingkat II Surabaya No. 188.45/251/402.1.04/1996 dan SK No. 188.45/004/402.1.04/1998 ditetapkan sebanyak 163 bangunan cagar budaya yang wajib dilindungi di Kota Surabaya.

Surabaya waktu itu, sehingga Jembatan Merah menjadi tempat yang sangat ramai pada zamannya dan melegenda sampai sekarang³⁰.

Hanya saja, Jembatan Merah yang kita saksikan sekarang adalah hasil peremajaan pemerintah kota. Dengan kata lain, jembatan tersebut bukan lagi jembatan sebagaimana yang pernah dipakai oleh arek-arek Surabaya sebagai benteng pertahanan ketika bertempur dengan sekutu. Upaya pemerintah ini mendapat tantangan dari masyarakat, sedangkan perguruan tinggi bersikap ambigu, ada yang ikut merusak dan ada yang membela. Dalam berbagai kesempatan, Johan Silas (seorang guru besar ITS Surabaya) misalnya, selalu mengecam tindakan pemerintah kota yang melakukan pemugaran Jembatan Merah tanpa memperhatikan aspek historisnya. “Agaknya dosa terhadap sejarah ini sudah harus selesai sampai di sini, dan tak boleh terulang lagi” demikian kata Silas³¹.

Di kawasan Jembatan Merah inilah terjadi serangkaian pertempuran yang dahsyat antara pejuang republik dengan tentara sekutu. Menurut cerita orang-orang tua, di kolong jembatan inilah pasukan arek-arek Surabaya mempertahankan diri dari serangan musuh. Bagi sebagian masyarakat Surabaya, Jembatan Merah tidak lagi sekedar sebagai sarana transportasi, tetapi sudah menjadi simbol semangat perjuangan yang tidak pernah lekang. Dengan demikian, sangat bisa dipahami jika peremajaan jembatan merah tanpa memperhatikan aspek sejarahnya mengundang pro dan kontra.

Pertempuran di sekitar Jembatan Merah adalah pertempuran yang paling hebat di mana tentara Inggris menduduki gedung Internatio yang berada di kawasan itu. Dalam pertempuran yang mulai berkobar pada tanggal 27 Oktober 1945 di depan gedung Internatio itu, Brigjen Mallaby terbunuh yang menyebabkan kemarahan tentara Inggris. Sebagai akibatnya, terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat yang kemudian melahirkan Hari Pahlawan 10 November 1945.

³⁰Handinoto, *Perkembangan dan Arsitektur Kolonial Belanda di Surabaya (1870-1940)* (Surabaya: Universitas Kristen PETRA-Andi Press, 1996), hal. 28; 35.

³¹Johan Silas, *Kampung Surabaya Menuju Metropolitan* (Surabaya: Yayasan Keluarga Bhakti Surabaya dan Surabaya Post, 1996), hal. 77; Johan Silas, ‘Pengalaman pelestarian bangunan bersejarah di Surabaya’, Makalah Seminar Pelestarian Pusaka Budaya: Kebijakan dan Praktek di Prancis dan Indonesia, Surabaya, 11 Mei 2004.

Tugu pahlawan: Ikon kota yang kesepian. Tugu yang pertama didirikan pasca proklamasi adalah Tugu Pahlawan yang terletak di bekas gedung *raad van justisie* (zaman Belanda) atau bekas gedung *kempetai* (zaman Jepang). Pendirian tugu ini digagas oleh Doel Arnowo (1950-1952), walikota pertama sesaat setelah penyerahan kedaulatan.

Dengan pekerjaan yang sangat singkat dan tergesa-gesa (hanya 13 bulan sejak peletakan batu pertama), tugu yang diharapkan akan berumur 100 tahun lebih ini, pada tanggal 10 November 1952 jam 10.00 WIB diresmikan oleh Presiden Soekarno. Tugu ini melambangkan perjuangan “arek-arek Surabaya” dalam pertempuran 10 November 1945. Tinggi tugu 45 yard (41,13 meter) melambangkan tahun 1945; 10 lengkungan (*canalures*) pada badan tugu melambangkan tanggal 10; dan 11 bagian (*geledingen*) melambangkan bulan 11 (November). Pada bagian bawah (dinding relief) dihiasi dengan ornamen-ornamen yang berbentuk trisula, cakra, cangka, stambha, dan padma mula. Makna filosofis dari ornamen ini adalah asal mula manusia yang dalam perjuangan timbul kekuatan keberanian berkobar dalam hati nurani membela kepentingan/kemerdekaan sesama manusia yang dalam pewayangan memakai senjata yang ampuh yakni Cakra pusaka Kresna dan Trisula pusaka Arjuna³².

Setelah melalui berbagai kendala, baik persoalan finansial, maupun masalah kepanitiaan, akhirnya tugu tersebut diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 10 November 1952. Bagi Soekarno, tugu pahlawan tidaklah sekedar bangunan materil, tetapi dia adalah lambang dari sebuah jiwa besar. Hal ini tampak dari pidatonya ketika meresmikan tugu tersebut.

‘Tugu pahlawan jang gagah perkasa, jang mendjulung langit ini, adalah sebagai lambang pengisi dada pahlawan jang telah gugur pada tudjuh tahun jang lampau. Hendaknja kita jang mengelilingi Tugu inipun akan mengisi dada kita dengan tekad jang sebulat2nja untuk mengisi kemerdekaan kita dan tjita2 kita jang sediakala.

Baiklah rakjat Indonesia mengambil tjontoh djiwa pahlawan jang besar ini. Karena tjita2 mereka jang besar, karena tekad mereka jang sebulat2nja, karena persatuan mereka jang seerat2njalah, maka pada tgl. 10 Nopember 1945 meletuslah di Surabaja suatu peristiwa jang dapat membuktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa jang berdjiwa besar.

³²Prayoga Kartomihardjo, dkk., *Monumen Perjuangan Jawa Timur* (Jakarta: Kem. P dan K., 1986), hal. 123; R. Sarodja, *op. cit.*, hal. 4.

Peristiwa 10 Nopember inilah yang membuktikan kepada seluruh dunia bahwa bangsa Indonesia tidak berdjiwa ketjil seperti yang mereka tahu. Djiwa yang besar jg diiringi oleh tekad yang sebulatnja dibuktikan oleh pahlawan2 kita kepada dunia'³³.

Bagi Soekarno, mahalny biaya untuk membangun sebuah monumen tidak ada artinya dibandingkan dengan kebesaran jiwa yang disimbolkan melalui monumen atau tugu tersebut. Hal ini pernah disampaikan Soekarno menanggapi mahalny biaya untuk pembangunan Monumen Nasional (Monas) di Jakarta, ia berkata:

“Tidak, saudara-saudaraku, kita tidak membangun sebuah Monumen Nasional yang berharga setengah juta dolar hanya untuk membuang uang. Tidak! Kita sedang membuat ini karena kita menyadari bahwa sebuah bangsa yang hebat, jiwanya dan hasratnya adalah kebutuhan yang absolut untuk kehebatannya, harus disimbolkan dengan sebuah benda materiil, sebuah benda yang hebat bahkan, yang kadang akan membuka mata dari bangsa-bangsa lain dengan penuh kekaguman.”³⁴

Selain tugu pahlawan, terdapat puluhan tugu dan patung yang dibangun di atas kawasan yang menjadi titik-titik pertempuran arek-arek Suroboyo melawan penjajah. Tugu dan patung yang umumnya dibangun pada tahun 1970-an ini antara lain: Patung Panglima Besar Jenderal Sudirman di Jl. Yos Sudarso, Patung Karapan Sapi di Jl. Urip Sumohardjo, Patung setengah badan Dr. Soetomo di depan Gedung Nasional Indonesia (GNI) Jalan Bubutan, Patung Bahari di depan bekas Museum Mpu Tantular, Patung Perjuangan di Aloon-aloon Contong, Patung Perjuangan di depan Bioskop REX (RIA), dan lain-lain.

Semua monumen, patung, dan tugu yang dibangun, baik oleh pemerintah kolonial maupun oleh pemerintah Kota Surabaya memiliki makna dan simbol-simbol tertentu. Selain itu, kita dapat menyaksikan bentuknya yang besar dan mencolok mata. Hanya saja menyaksikan monumen, patung, dan tugu perjuangan saat ini sungguh menyisakan sebuah ironi. Banyak dari patung dan monumen itu dibiarkan tidak terawat dan justru menjadi, maaf, tempat buang air kecil para tukang becak dan sopir-sopir

³³Peresmian Tugu Pahlawan: Lambang daripada djiwa besar' Dalam *Djawa Pos*, 11 Nopember 1952.

³⁴Pernyataan tersebut disampaikan oleh Soekarno saat pamancangan pondasi Mesjid Istiqlal, Jakarta 24 Agustus 1961, ANRI, Pidato Kepresidenan, No. 326, teks asli dalam bahasa Inggris, sebagaimana dikutip oleh Farabi Fakhri, *Membayangkan Ibu Kota Jakarta di Bawah Soekarno* (Yogyakarta: Ombak, 2005), hal. 52.

angkutan kota. Jika mengunjungi monumen di Jembatan Merah misalnya, maka bau pesing akan menyengat kita. Demikian pula monumen di depan Jl. Kombes Duryat justru menjadi pangkalan para tukang becak.

Membangun kebesaran jiwa atau penghamburan uang: Tanggapan masyarakat atas pendirian berbagai monumen dan tugu

Kondisi kota-kota di Indonesia termasuk Surabaya pada pasca penyerahan kedaulatan akhir Desember 1949 mulai stabil. Pemerintahan yang semula diambil alih oleh tentara Belanda, kini berganti dengan diangkatnya Doel Arnowo sebagai walikota. Dalam kondisi yang stabil ini Kota Surabaya mulai membenahi diri dengan membangun berbagai infrastruktur kota. Pada awal tahun 1950-an terdapat tiga hal penting yang dibangun, yaitu Pasar Wonokromo, Hotel Olympic, dan Tugu Pahlawan. Selain itu direncanakan pula untuk membangun sebuah monumen untuk mengenang jasa-jasa W. R. Soeprman.

Sebagai sebuah bangsa yang baru terbebas dari hegemoni asing, berbagai monumen, tugu, dan patung pun dibangun sebagai simbol dari kebesaran jiwa dan sekaligus sebagai penghargaan atas jasa para pahlawan. Alasan pembangunan tersebut tentunya dapat diterima, akan tetapi persoalannya adalah pembangunan itu dilaksanakan di tengah kondisi ekonomi kota yang baru pulih dari keterpurukan akibat perang. Akibatnya, banyak kalangan yang menilai pembangunan simbol-simbol kota ini sebagai sebuah pemborosan keuangan yang semestinya dipergunakan untuk kepentingan masyarakat yang lebih ril dan mendesak.

Keresahan masyarakat tersebut dapat dibaca dalam berbagai harian yang terbit pada saat itu. Djawa Pos, 8 November 1952 misalnya, menurunkan sebuah tulisan yang ditulis oleh Sukarsono yang berisi kritikan dan seruan untuk menghentikan berbagai pembangunan monumen dan mengalihkannya ke bentuk yang menurutnya lebih bermanfaat. Berikut kutipan sebagian dari tulisan tersebut.

‘Sungguh amat bermanfaat bila penghormatan terhadap pahlawan-pahlawan jang gugur itu tidak dengan mendirikan tugu2 atau memindahkan makam; melainkan dengan mendirikan jajasan2 jang memelihara jatim-piatu tinggalan pahlawan2 itu, rumah2 sekolah dan lain2 pendirian sosial. Dengan diberi nama pahlawan jang dimaksud itu.

Misalnya ongkos pendirian tugu Wr. Supratman sampai Rp 150.000,- dipergunakan pendirian rumah sekolah sudah mendapat satu rumah sekolah rakjat. Dan sekolah itu dinamakan Sekolah Rakjat Wr. Supratman³⁵.

Tulisan yang diturunkan oleh Djawa Pos dua hari sebelum diresmikannya Tugu Pahlawan oleh Presiden Soekarno ini, sesungguhnya ingin mengeritik rencana pembangunan monumen W.R. Soepratman yang saat itu sedang dipersiapkan. Bagi beberapa kalangan, memberi perhatian yang lebih terhadap janda-janda yang suaminya meninggal dalam peperangan atau anak-anak yang harus kehilangan ayahnya akibat gugur dalam pertempuran adalah lebih penting dibanding mendirikan tugu atau monumen.

‘Sekarang kita lebih menjanjung–njanjung arwah2 jang telah meninggal tetapi sebaliknya membiarkan – atau sedikit sekali perhatian terhadap djanda2 dan jatim-piatu pahlawan itu dalam keadaan terlantar. Bagaimanakah sukarnja atau lambatnja keluaranja pensiun djanda dan piatu, tidak hanya karena soal2 administratif jang harus dipenuhi, tetapi djuga karena semangat indolensi [*sic.*] dan kurangnya sosial gevoel terhadap nasib para djanda dan piatu itu’.³⁶

Beberapa bulan sebelum munculnya kritik ini, pada bulan Maret 1958, walikota yang waktu itu dijabat oleh Moestadjab Soemowidigdo (1952-1956), harus memberi penjelasan kepada wartawan sehubungan dengan banyaknya tanggapan dari masyarakat atas pendirian Tugu Pahlawan. Bagi masyarakat, pembangunan tugu itu hanya menghambur-hamburkan uang yang semestinya digunakan untuk keperluan yang lebih penting buat rakyat. Di tengah berbagai kritikan walikota tetap bersikukuh untuk melanjutkan pembangunan tugu tersebut. Menurut Moestadjab, tugu itu merupakan lambang Revolusi 10 November 1945, dimana perjuangan kemerdekaan kita bergema dalam udara internasional. Berkaitan dengan dana pembangunan tugu, Moestadjab menambahkan bahwa uang yang diperoleh untuk pendirian tugu tidak hanya ditanggung oleh pemerintah, tetapi mendapat bantuan dari pengusaha-pengusaha dan Persibaja³⁷.

³⁵ ‘Hentikan tugu²an! Hentikan tugu²an! Dirikanlah “sekolah-sekolah Wr. Supratman” Dalam *Djawa Pos*, 8 November 1958.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ ‘Tugu nasional..., *loc. cit.*

Dalam bentuk dan skala yang berbeda, kritik atas pendirian sebuah monumen, tugu, atau patung hingga kini masih terus berlanjut. Protes masyarakat atas pendirian patung Raffles merupakan contoh yang baik untuk menerangkan protes yang terus berlanjut ini. Jauh sebelum munculnya protes atas patung Raffles, sebuah patung Karapan Sapi yang terletak di salah satu jalan utama (antara Jalan Urip Sumohardjo dan Jalan Basuki Rahmat) juga menjadi pembicaraan banyak kalangan. Menurut beberapa pihak, patung yang cukup indah tersebut salah tempat, dia seharusnya tidak berada di Kota Surabaya, tetapi di Madura. Hal ini karena karapan sapi adalah tradisi masyarakat Madura, bukan Surabaya. Persoalannya kemudian adalah kenapa patung tersebut berada di Kota Surabaya bukan di Madura. Menurut banyak kalangan, hal ini sangat berkaitan dengan gubernur Jawa Timur ketika itu yang berasal dari Madura, yakni M. Nur.

Penutup

Dari uraian-uraian sebelumnya tampak hubungan yang signifikan antara siapa yang berkuasa dengan kehadiran monumen, patung, dan tugu. Sampai akhir masa kekuasaannya, pemerintah Belanda mendirikan ± 14 monumen dan patung. Seperti yang terjadi di Padang, monumen dan tugu di Surabaya juga banyak didirikan atas prakarsa perorangan dan kelompok. Akan tetapi, jika di Padang pemerintah Belanda masih menyisakan tempat untuk tugu berukuran kecil yang secara resmi untuk menghormati organisasi nasionalis JSB, maka di Surabaya semua monumen dan patung beraroma kolonial.

Sampai tahun 1960-an, hanya ada dua monumen yang tersisa, tetapi kemudian juga harus rata dengan tanah dan diganti dengan patung perjuangan. Ketika keadaan kota mulai stabil, khususnya pasca penyerahan kedaulatan, pemerintah mulai mendirikan banyak monumen, patung, dan tugu. Salah satu tugu yang terkenal adalah tugu pahlawan yang didirikan di bekas kantor Raad van Justitie pada zaman Belanda dan gedung Kempetai pada masa Jepang. Tugu yang didirikan pada tahun 1952 (lebih dahulu dibanding Monas Jakarta) ini, menjadi contoh yang baik dari sebuah proses dekolonisasi.

Bibliografi

- AKS (Arsip Kota Surabaya), box 1227, no. 25813.
- Alfian, *Hasil Pemilu Tahun 1955 untuk D.P.R.* Jakarta: Leknas, 1971.
- Alwi, Hasan, dkk. (ed.). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Colombijn, Freek. *Patches of Padang: The History of an Indonesia Town in the Twentieth Century and the Use of Urban Space*. Leiden: Research School CNWS, 1994.
- '. 'Sign of the times: Symbolic change around Indonesian independence.' Makalah International Workshop Urban Symbolism, Leiden, 16- 18 Juni 2004.
- Djava Post*, 29 Pebruari 1952.
- Djawa Pos*, 11 Nopember 1952.
- Djawa Pos*, 3 Djuni 1958.
- Djawa Pos*, 8 November 1958.
- Faber, G. H. von. *Oud Soerabaia, de Geschiedenis van Indië's Eerste Koopstad van de Oudste Tijden tot de Instelling van den Gemeenteraad*. Soerabaia: Gemeente Soerabaia, 1931.
- '. *Nieuw Soerabaia, de Geschiedenis van Indies Voornamste Koopstad in the Eerste Kwarteeuw Sedert Hare Instelling 1906-1931*. Soerabaia: Gemeente Soerabaia, 1993.
- Fakih, Farabi. *Membayangkan Ibu Kota Jakarta di Bawah Soekarno*. Yogyakarta: Ombak, 2005.
- Handinoto. *Perkembangan dan Arsitektur Kolonial Belanda di Surabaya (1870-1940)* Surabaya: Univesitas Kristen PETRA-Andi Press, 1996.
- H. Frederick, William. *Pandangan dan Gejolak: Masyarakat Kota dan Lahirnya Revolusi Indonesia (Surabaya 1926-1946)*. Jakarta: Gramedia, 1986.
- Kartomihardjo, Prayoga dkk. *Monumen Perjuangan Jawa Timur*. Jakarta: Kem. P & K, 1986.
- Kasansengari, Oerip. *Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan W. R. Soepratman pentjiptanja* Surabaya: Grafika Karya, 1967.
- Kenangan Masjid Al-Falah*. Surabaya: Yayasan Masjid Al-Falah, 1997.
- Ricklefs, M.C. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994.
- Sanit, Arbi. *Badai Revolusi: Sketsa Kekuatan Politik PKI di Jawa Tengah dan Jawa Timur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Sapujagat*, no. 59, tahun V, 1-15 Juli 2004.
- Silas, Johan. "Pengalaman pelestarian bangunan bersejarah di Surabaya", Makalah Seminar Pelestarian Pusaka Budaya: Kebijakan dan Praktek di Prancis dan Indonesia, Surabaya, 11 Mei 2004.
- SK Walikotamadya Kepala daerah Tingkat II Surabaya No. 88.45/251/ 402.1.04/1996.
- Sudarno, dkk. *Sejarah Pemerintahan Militer dan Peran Pamong Praja di Jawa Timur Selama Perjuangan Fisik 1945-1950*. Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Surabaja Post*, 12 Djuni 1958.
- Surabaja Post*, 15 Oktober 1962.

Surabaya Post 11 Maret 1964.

Wiryoprawiro, Zein M. *Perkembangan Arsitektur Masjid di Jawa Timur*. Surabaya: Bina Ilmu, 1986.